



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep- **161** /DPP/GOLKAR/IV/2026

Tentang

PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAM PARTAI GOLKAR PERIODE 2024 – 2029

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, Badan atau Lembaga di setiap tingkatan organisasi merupakan sarana penunjang pelaksanaan program Partai.
 - b. bahwa Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golongan Karya adalah bentuk sarana penunjang dalam melaksanakan program Partai Golongan Karya di bidang hukum guna melakukan upaya advokasi/pendampingan hukum kepada kader, pengurus maupun masyarakat luas yang membutuhkan advokasi.
 - c. bahwa karena telah berakhirnya periode Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golongan Karya periode 2019-2024, maka perlu dibentuk dan ditetapkan kembali Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golongan Karya periode 2024 – 2029.
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029.
- Mengingat :
- 1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VI/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
 - 2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Program Umum Partai Golongan Karya.
 - 3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : XII/MUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029.
 - 4. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-14.AH.11.02 TAHUN 2024 Tanggal 18 November 2024 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA TENTANG PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAM PARTAI GOLONGAN KARYA PERIODE 2024 – 2029.

1. Mengesahkan dan menetapkan Susunan dan Personalia Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golongan Karya Periode 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
2. Periode kepengurusan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golongan Karya sebagaimana diktum pertama adalah sama dengan kepengurusan DPP Partai Golongan Karya.
3. Tugas Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golongan Karya adalah:
 - a. Mendorong dan memajukan upaya penciptaan/pembentukan suatu sistem hukum nasional yang adil dan demokratis, serta berlaku sama bagi setiap Warga Negara Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi asas "*Due Process of Law*".
 - b. Memberikan advokasi, bantuan hukum, penyuluhan dan pelayanan Hukum khususnya bagi anggota Partai dan Pengurus Partai GOLKAR dan umumnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - c. Melakukan upaya-upaya yang bersifat memenangkan Partai Golongan Karya secara jujur dan adil khususnya pada sengketa hasil suara di Mahkamah Konstitusi RI pada Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif serta Pilkada dan membentuk Kelompok Kerja demi kelancaran tugas dan fungsi Badan Advokasi Hukum.
 - d. Menjaga wibawa Partai Golongan Karya sehingga tidak mudah diperlakukan secara melawan hukum oleh pihak manapun untuk menurunkan kredibilitas dan citra Partai Golongan Karya.
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan memberikan rekomendasi kepada DPP Partai Golongan Karya.
4. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2026

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



BAHLIL LAHADALIA

NPAPG : 9171020708760002



MUHAMMAD SARMUJI

NPAPG : 3174011006740013

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT
 BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAM PARTAI GOLKAR
 PERIODE 2024 – 2029**

NO	N A M A	JABATAN
I. DEWAN PEMBINA		
1	BAHLIL LAHADALIA, S.E., M.Si.	KETUA
2	MUHAMMAD SARMUJI, S.E., M.Si.	Anggota
3	Dr. Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	
II. DEWAN PENGAWAS		
4	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.	KETUA
5	MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.	Anggota
6	IRWAN, S.H., M.H.	
7	DEREK LOUPATTY, S.H., M.H.	
8	Drs. MUSTAFA MAKMUN RADJA, M.H.	
9	Dr. ACHMAD TAUFAN SOEDIRDJO, S.H., M.H.	
10	MUSLIM JAYA BUTARBUTAR, S.H., M.H.	
11	Prof. Dr. K.P.A. HENRY INDRAGUNA, S.H., M.H.	
III. DEWAN PENGURUS		
12	MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H.	KETUA
13	ADIEL MUHAMMAD KANANTHA, S.H., LL.M.	Wakil Ketua Bidang Kebijakan Regulasi Perundang-Undangan dan Pembaharuan Hukum Nasional
14	AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Kebijakan Strategis
15	Dr. TEGUH SATYA BAKTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
16	BRODUS, S.H.	Wakil Ketua Bidang Tata Usaha Negara
17	DANIEL TONAPA M, S.H.	Wakil Ketua Bidang Perdata Umum dan Khusus
18	KOMBES POL (Purn) Dr. MARULI SIAHAAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Pidana Umum dan Khusus
19	GUNTUR SETIAWAN, S.H., M.Si.	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
20	ALBERTHUS, S.H.	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Masyarakat Sipil
21	VIOLA MEIRYAM AZZA, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Pendampingan Perempuan dan Anak
22	MUKMIN, S.H.	Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Pers, dan Media Sosial

23	H. SARI ANTONI, S.H., M.M.	Wakil Ketua Bidang Penanganan dan Pendampingan Indonesia Bagian Barat
24	HERDIKA SUKMA NEGARA, S.H.	Wakil Ketua Bidang Penanganan dan Pendampingan Indonesia Bagian Tengah
25	TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.	Wakil Ketua Bidang Penanganan dan Pendampingan Indonesia Bagian Timur
26	DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.	SEKRETARIS
27	DICKY BASTIAN PUTRA, S.H.	Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Regulasi Perundang-Undangan dan Pembaharuan Hukum Nasional
28	RUSDI, S.H.	Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Kebijakan Strategis
29	HASBULLAH A. HAKIM, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Bidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
30	A. FADHLI ABI RAFDI, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Bidang Tata Usaha Negara
31	DODI BOY FENA LOZA, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Bidang Perdata Umum dan Khusus
32	JANTER MANURUNG, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Bidang Pidana Umum dan Khusus
33	ABDUL HAJI TALAOHU, S.H.	Wakil Sekretaris Bidang Pendampingan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
34	ADRIANUS AGAL, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Bidang Pendampingan Masyarakat Sipil
35	LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.	Wakil Sekretaris Bidang Pendampingan Perempuan dan Anak
36	ANDI SALMAN, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat, Pers, dan Media Sosial
37	ILHAMSYAH, S.H.	Wakil Sekretaris Bidang Penanganan dan Pendampingan Indonesia Bagian Barat
38	ABDUL WAHAB, S.H., M.H.	Wakil Sekretaris Bidang Penanganan dan Pendampingan Indonesia Bagian Tengah
39	FUZAIL ABDURRAHMAN HAKIM, S.H.	Wakil Sekretaris Bidang Penanganan dan Pendampingan Indonesia Bagian Timur
40	MARISSA HARAHAHAP, S.H., M.H.	BENDAHARA
41	ADHISTI NOVIA MANALIF, S.E., M.H.	Wakil Bendahara
42	KINANTY ASTRYA, S.H.	Wakil Bendahara
43	RISKA NINDYA INTANI, S.H.	Wakil Bendahara
44	IKA AYUNITA SARASWATI, S.H.	Wakil Bendahara
45	MELLY ANGGRAINI MATASIK, S.H.	Wakil Bendahara
46	ANINDITA KURNIA PUTRI, S.H., M.H.	Wakil Bendahara
47	SHAHNAZ NABILA, S.H.	Wakil Bendahara

IV. BIDANG KEBIJAKAN REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL		
48	BINTANG SULUH, S.H., M.H.	Anggota
49	MUYASSAR NUGROHO, S.H., M.H.	
50	ANDREW SIMATUPANG, S.H.	
V. BIDANG ORGANISASI, KELEMBAGAAN, DAN KEBIJAKAN STRATEGIS		
51	SANDY BATARA YUDHA B,S.H., M.H., CLA.	Anggota
52	TAMREN SIREGAR, S.H., M.H.	
53	HENRY RH NAPITUPULU, S.H.	
VI. BIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA		
54	KARSEDI, S.H., M.H.	Anggota
55	TAMRIN, S.H., M.H.	
56	ENDANG SUKENDAR, S.H.	
VII. BIDANG TATA USAHA NEGARA		
57	M. BISMAR MH TAWARI, S.H., M.H.	Anggota
58	TRI ALFIAN MACHWANA, S.H.	
59	PARTOGI BERINGIN MANURUNG, S.H.	
VIII. BIDANG PERDATA UMUM DAN KHUSUS		
60	ALI ASHGOR OTTA RINJANI, S.H., M.H.	Anggota
61	DANIEL ACHYARI, S.H.	
62	WIRANTO EMBONG BULAN, S.H.	
IX. BIDANG PIDANA UMUM DAN KHUSUS		
63	AMIRUDIN, S.H., M.H.	Anggota
64	MUHAMMAD IQBAL S. GINTING, S.H.	
65	SYAHLUKMAN PANJI SAMUDRO, S.H., LL.M.	
X. BIDANG PENDAMPINGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA		
66	Dr. RIZKY AMALIA SOLICHIN, S.H., M.H.	Anggota
67	MUHAMMAD SYAWAL, S.H.	
68	HENDRI ADI, S.H.	
XI. BIDANG PENDAMPINGAN MASYARAKAT SIPIL		
69	FELIX DAVID CHRISTIAN PANDAPOTAN, S.H.	Anggota
70	AGUS. SAEPUL ALAM, S.H., M.H.	
71	M. SYAHWAN AREY, S.H., M.H.	
XII. BIDANG PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
72	MUHAMMAD FADLY ZILJALAL, S.H., M.H.	Anggota
73	POPPY SAFITRY ARTISTA, Adm., S.H.	
74	IBNU BUDI KOTTA, S.H	

XIII. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, PERS, DAN MEDIA SOSIAL

75	MUHAMMAD NOER GEO MIYANA, S.H.	Anggota
76	DAUD HENDRIK H. MANALU, S.H.	
77	BAYU SAPUTRA MUSLIMIN, S.H.	

XIV. BIDANG PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN INDONESIA BAGIAN BARAT

78	ARIF RAHMAD SAID, S.H.	Anggota
79	REVINO RUSTAM, S.H., M.H.	
80	ARFA GUNAWAN, S.H.	

XV. BIDANG PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN INDONESIA BAGIAN TENGAH

81	HASAN AG, S.H.	Anggota
82	DANI HOTRON TAMPUBOLON, S.H., M.H.	
83	SEDEK RAHMAN BAHTA, S.H.	

XVI. BIDANG PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN INDONESIA BAGIAN TIMUR

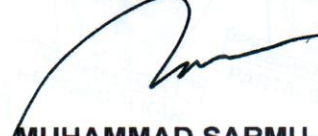
84	ARIEF RIZALDI, S.H.	Anggota
85	UMAR MONI, S.H.	
86	MISAELELEAZAR DAVID, S.H.	

Ketua Umum


BAHLIL LAHADALIA
NPAPG : 9171020708760002



Sekretaris Jenderal


MUHAMMAD SARMUJI
NPAPG : 3174011006740013